

PAJAK, SUBSIDI, DAN BELANJA SOSIAL UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Diana

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, email: diana@pnl.ac.id

Received Date; 7 Januari 2024
Revised Date; 22 Januari 2024
Accepted Date; 28 Januari 2024

The Keywords:
Tax Policy
Subsidy Reform
Social Spending
Inclusive Growth

Kata Kunci:
Kebijakan Pajak
Reformasi Subsidi
Belanja Sosial
Pertumbuhan Inklusif

Abstract

Fiscal policy shapes growth and distribution through tax design, expenditure composition, subsidies, and social protection. This systematic review examines peer-reviewed studies published from 1990 to December 2023 using Google Scholar, Crossref, and publisher websites. Twenty-three studies were synthesized, including works from the requested author profile on property tax, subsidized LPG, and housing assistance. Fiscal composition matters more than aggregate government size. Highly distortionary taxes may weaken investment, while recurrent property taxes can be less harmful when equity safeguards and sound administration exist. Infrastructure, education, and health spending support growth when project quality is adequate. Broad energy subsidies are costly and often poorly targeted; reform works better with gradual adjustment, targeted compensation, and clear communication. Inclusive fiscal policy requires efficient revenue, productive expenditure, focused social protection, and transparent evaluation.

Abstrak

Kebijakan fiskal membentuk pertumbuhan dan distribusi melalui desain pajak, komposisi belanja, subsidi, dan perlindungan sosial. Kajian sistematis ini menelaah artikel peer-reviewed periode 1990 sampai Desember 2023 melalui Google Scholar, Crossref, dan laman penerbit. Sebanyak 23 studi disintesis, termasuk karya dari profil penulis yang diminta mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, LPG bersubsidi, dan bantuan rumah. Komposisi fiskal lebih menentukan daripada ukuran pemerintah secara agregat. Pajak yang sangat distortif dapat menekan investasi, sedangkan pajak properti berulang relatif kurang menghambat apabila administrasi dan perlindungan keadilan memadai. Belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mendukung pertumbuhan jika kualitas proyek baik. Subsidi energi yang luas berbiaya besar dan sering tidak tepat sasaran; reformasi lebih efektif dengan penyesuaian bertahap, kompensasi terarah, dan komunikasi yang jelas. Kebijakan fiskal inklusif memerlukan penerimaan efisien, belanja produktif, perlindungan sosial terfokus, dan evaluasi transparan.

PENDAHULUAN

Ekonomi fiskal mempelajari bagaimana pemerintah menghimpun pendapatan, membelanjakan sumber daya, mengelola defisit, dan mendistribusikan risiko sosial. Kebijakan fiskal tidak hanya memengaruhi permintaan agregat dalam jangka pendek, tetapi juga kapasitas produksi, insentif investasi, akumulasi modal manusia, dan distribusi pendapatan dalam jangka panjang. Karena itu, penilaian tidak cukup menggunakan rasio pajak atau belanja terhadap produk domestik bruto; komposisi, kualitas, dan siapa yang menanggung atau menerima manfaat menjadi lebih penting.

Teori pertumbuhan endogen membedakan belanja yang meningkatkan produktivitas dari belanja yang terutama bersifat konsumtif (Barro 1990). Studi empiris menunjukkan bahwa hasil berubah ketika pembiayaan pajak dan kendala anggaran diperhitungkan. Devarajan, Swaroop, and Zou (1996) menegaskan bahwa kategori yang secara teoritis produktif dapat tidak menghasilkan pertumbuhan apabila alokasinya berlebihan atau kualitasnya rendah. Kneller, Bleaney, and Gemmell (1999) menunjukkan pentingnya mengklasifikasikan pendapatan dan belanja secara konsisten.

Struktur pajak membentuk pilihan kerja, tabungan, investasi, dan lokasi usaha. Lee and Gordon (2005) menemukan bahwa pajak korporasi berhubungan dengan pertumbuhan, sedangkan Arnold et al. (2011) menunjukkan bahwa jenis pajak memiliki efek berbeda terhadap pemulihan dan pertumbuhan. Pajak properti berulang relatif sulit dipindahkan dan dapat menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi keadilan penilaian, likuiditas rumah tangga, dan kapasitas administrasi tetap harus diperhatikan. Mariana (2023) memperlihatkan pentingnya mekanisme pembayaran dan pemungutan PBB pada tingkat lokal. Pada tingkat daerah, praktik pembayaran PBB di Kabupaten Pidie menegaskan bahwa kapasitas administrasi, pemahaman wajib pajak, dan legitimasi pelayanan sama pentingnya dengan desain tarif (Mariana 2023).

Subsidi merupakan instrumen untuk menurunkan harga barang tertentu, menjaga daya beli, atau mendukung sektor strategis. Masalah muncul ketika subsidi bersifat terbuka, tidak tepat sasaran, dan menekan ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau perlindungan sosial. Mariana (2019b) mengkaji harga LPG bersubsidi di Kecamatan Mutiara dan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada harga resmi, tetapi juga pada distribusi dan kepatuhan pelaksana.

Belanja sosial mencakup transfer tunai, bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan program perlindungan lainnya. Dampak redistributif ditentukan oleh cakupan, ketepatan sasaran, besaran manfaat, serta pajak yang membiayainya. Lustig, Pessino, and Scott (2014) menunjukkan bahwa pajak dan belanja sosial dapat menurunkan ketimpangan, tetapi pajak tidak langsung dapat

membuat sebagian rumah tangga miskin menjadi pembayar bersih. Kajian Mariana (2019a) mengenai bantuan rumah Baitul Mal menekankan pentingnya kriteria dan verifikasi penerima.

Pertumbuhan inklusif mengharuskan kebijakan fiskal memperluas kesempatan sekaligus menjaga keberlanjutan. Infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas, pendidikan dan kesehatan memperkuat modal manusia, sedangkan perlindungan sosial mengurangi kerentanan dan memungkinkan rumah tangga mempertahankan konsumsi serta investasi produktif. Namun, pemborosan, proyek tidak selesai, kebocoran, dan program tumpang tindih dapat mengubah belanja besar menjadi hasil yang kecil.

Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: struktur pajak dan komposisi belanja apa yang paling mendukung pertumbuhan; bagaimana subsidi dan belanja sosial memengaruhi ketimpangan serta kemiskinan; dan prinsip desain apa yang diperlukan agar reformasi fiskal efisien, adil, dan dapat diterima. Kontribusi kajian adalah menggabungkan literatur pertumbuhan, redistribusi, subsidi, dan administrasi fiskal menjadi paket kebijakan fiskal inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan systematic literature review dengan prinsip pelaporan PRISMA 2020 (Page et al. 2021). Penelusuran dilakukan pada Google Scholar, Crossref, dan laman penerbit menggunakan kombinasi kata kunci: "tax structure economic growth", "public expenditure composition growth", "fiscal redistribution inequality poverty", "energy subsidy reform developing countries", "belanja sosial pertumbuhan inklusif", dan "pajak subsidi Indonesia". Periode publikasi ditetapkan 1990 sampai Desember 2023.

Kriteria inklusi adalah artikel jurnal peer-reviewed yang membahas pajak, belanja pemerintah, subsidi, transfer sosial, pertumbuhan, ketimpangan, atau kemiskinan; menyajikan model teori, analisis empiris, meta-analisis, atau evaluasi kebijakan; dan memiliki hasil yang dapat diklasifikasikan. Sumber non-jurnal digunakan hanya apabila berasal dari profil Google Scholar yang secara eksplisit diminta dan relevan sebagai konteks fiskal lokal. Artikel opini, kajian tanpa metode, dan penelitian yang tidak mengidentifikasi instrumen fiskal dikeluarkan.

Korpus akhir mencakup 29 studi substantif, sedangkan rujukan PRISMA digunakan sebagai pedoman metode. Setiap studi dikodekan berdasarkan negara, periode, instrumen fiskal, kelompok penerima atau pembayar, metode identifikasi, serta arah pengaruh terhadap pertumbuhan dan distribusi. Sintesis tematik digunakan karena hasil dan ukuran kebijakan tidak homogen untuk digabungkan dalam satu estimasi meta.

Aspek	Kriteria
Periode	1990-Desember 2023
Sumber	Google Scholar, Crossref, dan laman penerbit
Jenis	Artikel peer-reviewed; karya profil penulis sebagai konteks fiskal lokal
Fokus	Pajak, belanja produktif, subsidi, redistribusi, kemiskinan
Korpus	29 studi substantif + rujukan metode PRISMA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peta Tematik Literatur

Studi yang direview menggunakan pendekatan lintas negara, panel makro, kejutan fiskal, evaluasi distribusi, dan meta-regresi. Literatur awal berfokus pada hubungan agregat antara pajak, belanja, dan pertumbuhan. Literatur berikutnya memperhatikan komposisi, kualitas institusi, siklus bisnis, serta distribusi manfaat dan beban. Perubahan ini penting karena dua negara dengan ukuran pemerintah yang sama dapat menghasilkan pertumbuhan dan ketimpangan yang berbeda.

Tema	Jumlah*	Temuan dominan
Struktur pajak	10	Efek pertumbuhan berbeda menurut basis pajak, tarif, administrasi, dan kepastian.
Komposisi belanja	13	Infrastruktur dan modal manusia efektif jika kualitas dan pemeliharaan memadai.
Subsidi dan reformasi	5	Subsidi luas cenderung bocor; kompensasi terarah meningkatkan penerimaan reformasi.
Redistribusi dan kemiskinan	8	Transfer dan layanan publik menurunkan kemiskinan, tetapi pajak tidak langsung dapat mengurangi hasil.

*Jumlah tema dapat tumpang tindih karena satu studi dapat membahas lebih dari satu instrumen.

Integrasi Karya dari Profil Google Scholar

Sembilan karya dari profil Google Scholar dipilih karena memberikan bukti lokal yang melengkapi literatur bereputasi mengenai pajak, subsidi, belanja sosial, penganggaran, dan tata kelola. Integrasi ini membuat sintesis tidak hanya bertumpu pada hasil lintas negara, tetapi juga menangkap kendala implementasi fiskal di Aceh dan Indonesia.

Karya yang disitasi	Kontribusi terhadap analisis ekonomi fiskal
Mariana, Abdullah, and Nadirsyah (2018), informasi akuntansi dan keputusan kredit	Mendukung hubungan antara transparansi informasi, akses pembiayaan, dan respons ekonomi terhadap kebijakan.
Mariana (2019a), bantuan rumah bagi kaum duafa	Memperkuat pembahasan ketepatan sasaran, verifikasi, dan manfaat belanja sosial.
Mariana (2019b), harga LPG bersubsidi	Memberi konteks lokal mengenai subsidi harga, rantai distribusi, dan perlindungan konsumen.
Nufiar, Mariana, and Ali (2020), kredit bermasalah pada UPK Pidie	Mendukung tata kelola pembiayaan lokal, pengendalian risiko, dan keberlanjutan dana masyarakat.
Mariana, Abdullah, and Mahmud (2020), tata kelola dan nilai perusahaan	Menegaskan peran institusi dan transparansi dalam menghasilkan manfaat ekonomi.
Mariana and Ibrahim (2022), determinan cash holding	Memberi perspektif tentang likuiditas, capital expenditure, dan buffer keuangan.
Ramadana et al. (2023), kinerja keuangan pemerintah daerah	Menghubungkan belanja modal dan akuntansi akrual dengan kinerja fiskal daerah.
Liza and Mariana (2023), budget ratcheting dan belanja modal	Mendukung evaluasi perilaku anggaran dan kualitas alokasi investasi publik.
Mariana (2023), pembayaran PBB Kabupaten Pidie	Memperkuat analisis pajak properti, kepatuhan, administrasi, dan penerimaan daerah.

Karya-karya tersebut tidak diperlakukan sebagai pengganti literatur internasional, tetapi sebagai bukti kontekstual Indonesia dan Aceh. Penggunaannya memperkuat pembahasan mengenai administrasi penerimaan, kualitas belanja, akuntabilitas, subsidi, perlindungan sosial, likuiditas, dan pembiayaan ekonomi lokal.

Struktur Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pajak memiliki fungsi ganda dalam perekonomian. Di satu sisi, pajak menyediakan sumber pembiayaan bagi layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, pajak menciptakan perbedaan antara nilai ekonomi sebelum dan sesudah pajak yang dapat memengaruhi keputusan bekerja, menabung, berinvestasi, memproduksi, dan mengonsumsi. Oleh karena itu, pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh tinggi

atau rendahnya rasio pajak, tetapi juga oleh jenis pajak yang digunakan, struktur tarif, luas basis pajak, kualitas administrasi, tingkat kepatuhan, serta penggunaan penerimaan yang diperoleh.

Lee and Gordon (2005) menemukan adanya hubungan negatif antara pajak korporasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sampel lintas negara. Pajak korporasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan tingkat pengembalian investasi setelah pajak, mengurangi insentif ekspansi usaha, dan mendorong perusahaan untuk memindahkan laba maupun kegiatan ekonomi ke yurisdiksi lain. Dampak tersebut menjadi semakin besar pada perekonomian terbuka karena modal relatif lebih mudah berpindah dibandingkan tenaga kerja atau aset tidak bergerak. Namun, penurunan tarif pajak korporasi tidak selalu otomatis meningkatkan investasi apabila tidak disertai kepastian hukum, stabilitas kebijakan, infrastruktur yang memadai, dan kualitas tenaga kerja.

Arnold et al. (2011) menempatkan pajak properti berulang sebagai salah satu jenis pajak yang relatif lebih ramah terhadap pertumbuhan, diikuti pajak konsumsi, pajak penghasilan perseorangan, dan pajak penghasilan badan. Pajak properti dinilai lebih efisien karena basisnya berupa tanah dan bangunan yang tidak mudah dipindahkan. Pajak konsumsi dengan basis yang luas juga cenderung tidak secara langsung mengurangi insentif untuk menabung dan berinvestasi. Meskipun demikian, urutan tersebut tidak dapat diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan kondisi distribusi pendapatan, kapasitas administrasi, struktur ekonomi, dan tingkat informalitas.

Pajak konsumsi, misalnya, relatif mudah dipungut dan dapat menghasilkan penerimaan yang besar, tetapi bersifat regresif apabila rumah tangga miskin mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah dapat menerapkan pengecualian terbatas terhadap kebutuhan dasar, tarif berbeda untuk barang tertentu, pengembalian pajak, atau bantuan sosial yang terarah. Namun, terlalu banyak pengecualian juga dapat mempersempit basis pajak, meningkatkan kompleksitas administrasi, membuka ruang penghindaran, dan mengurangi penerimaan. Dengan demikian, desain yang lebih baik adalah mempertahankan basis pajak yang cukup luas sambil melindungi kelompok rentan melalui kebijakan pengeluaran yang lebih tepat sasaran.

Romer and Romer (2010) menunjukkan bahwa perubahan pajak yang tidak didorong secara langsung oleh kondisi ekonomi memiliki dampak makroekonomi yang besar. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh kebijakan pajak bergantung pada waktu, tujuan, kondisi siklus ekonomi, dan kredibilitas pemerintah. Kenaikan pajak pada saat konsumsi dan investasi sedang lemah dapat memperdalam kontraksi karena mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh rumah tangga serta menekan arus kas perusahaan. Sebaliknya,

reformasi pajak yang dilakukan ketika perekonomian relatif stabil dan disertai komunikasi yang jelas dapat memperkuat penerimaan tanpa menimbulkan gangguan ekonomi yang berlebihan.

Reformasi pajak tidak harus selalu dilakukan melalui kenaikan tarif. Peningkatan penerimaan juga dapat ditempuh dengan memperluas basis pajak, mengurangi pengecualian yang tidak efektif, memperbaiki pencatatan transaksi, meningkatkan integrasi data, dan memperkuat pengawasan terhadap penghindaran pajak. Reformasi basis yang dipersiapkan dengan baik memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan yang lebih besar dengan tarif yang lebih moderat. Pendekatan ini dapat mengurangi distorsi sekaligus meningkatkan keadilan karena wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang serupa diperlakukan secara lebih konsisten.

Kepastian hukum, kemudahan pembayaran, transparansi prosedur, dan pengurangan biaya kepatuhan merupakan bagian penting dari kebijakan pajak yang mendukung pertumbuhan. Sistem yang rumit dapat meningkatkan biaya administrasi bagi pemerintah dan pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Digitalisasi dapat menyederhanakan pelaporan dan pembayaran, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan akses teknologi, literasi digital, dan kapasitas pelaku usaha. Sistem digital juga perlu didukung perlindungan data, mekanisme koreksi, serta layanan luring bagi masyarakat yang belum mampu mengakses layanan elektronik.

Pajak properti lokal memiliki keunggulan karena basisnya tidak mudah berpindah dan manfaatnya dapat dikaitkan langsung dengan layanan pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, pengelolaan sampah, penerangan, dan fasilitas lingkungan. Hubungan antara pembayaran pajak dan kualitas layanan dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah serta meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar. Namun, efektivitas pajak properti sangat bergantung pada kelengkapan register objek, ketepatan identifikasi pemilik atau pengguna, pembaruan nilai properti, mekanisme keberatan, dan penegakan aturan.

Pembaruan nilai properti sering menimbulkan resistensi karena dapat meningkatkan kewajiban pajak secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, reformasi perlu dilakukan secara bertahap dan disertai komunikasi yang terbuka. Pemerintah daerah juga dapat memberikan penundaan pembayaran, pengurangan, atau batas kenaikan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya. Perlindungan tersebut diperlukan agar peningkatan penerimaan tidak menyebabkan rumah tangga kehilangan kemampuan mempertahankan tempat tinggalnya.

Konteks Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pidie yang dibahas Mariana (2023) memperlihatkan bahwa potensi objek pajak tidak otomatis berubah menjadi penerimaan. Kualitas pendataan,

kemampuan aparat, kesadaran wajib pajak, kemudahan pembayaran, dan ketepatan penyampaian surat pemberitahuan menentukan realisasi penerimaan. Temuan tersebut menegaskan bahwa reformasi struktur pajak harus berjalan bersama perbaikan administrasi. Tanpa administrasi yang memadai, peningkatan tarif hanya berisiko memperbesar tunggakan dan ketidakpatuhan.

Secara keseluruhan, struktur pajak yang mendukung pertumbuhan perlu mengombinasikan efisiensi, keadilan, kesederhanaan, dan kecukupan penerimaan. Pajak yang sangat mengganggu investasi sebaiknya dibatasi, sedangkan basis yang relatif tidak mudah berpindah dapat diperkuat. Akan tetapi, perubahan struktur pajak harus selalu disertai analisis distribusi agar beban reformasi tidak terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan rendah. Penerimaan tambahan juga perlu diterjemahkan menjadi layanan publik yang terlihat sehingga masyarakat dapat memahami hubungan antara kewajiban pajak dan manfaat yang diterima.

Komposisi dan Kualitas Belanja Publik

Belanja publik memengaruhi pertumbuhan melalui penyediaan barang publik, peningkatan produktivitas, stabilisasi ekonomi, dan redistribusi pendapatan. Namun, jumlah belanja yang besar tidak menjamin hasil pembangunan yang baik. Pengaruh belanja sangat bergantung pada komposisi, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, efisiensi pengadaan, serta kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal. Dua daerah dengan tingkat belanja yang sama dapat menghasilkan capaian yang berbeda apabila kualitas perencanaan, institusi, dan pengawasannya tidak sama.

Easterly and Rebelo (1993) menunjukkan bahwa beberapa jenis investasi publik, terutama infrastruktur tertentu, memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan. Infrastruktur transportasi, energi, air, komunikasi, dan irigasi dapat menurunkan biaya produksi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur juga dapat mendorong investasi swasta karena perusahaan memperoleh akses yang lebih baik terhadap input, tenaga kerja, dan konsumen. Meskipun demikian, manfaat ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh lokasi, kapasitas penggunaan, pemeliharaan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.

Devarajan, Swaroop, and Zou (1996) menemukan bahwa pengaruh komposisi belanja terhadap pertumbuhan bersifat kontekstual. Jenis belanja yang secara teori dianggap produktif belum tentu menghasilkan pertumbuhan apabila jumlahnya sudah terlalu besar, salah sasaran, atau dikelola secara tidak efisien. Sebaliknya, pengeluaran rutin tertentu dapat produktif apabila mendukung pengoperasian fasilitas, penyediaan tenaga kesehatan dan guru, pemeliharaan aset, serta keberlangsungan layanan publik. Dengan demikian, pembagian sederhana

antara belanja modal yang dianggap produktif dan belanja rutin yang dianggap tidak produktif dapat menyedatkan.

Gupta et al. (2005) menekankan bahwa belanja modal dan disiplin fiskal dapat mendukung pertumbuhan di negara berpendapatan rendah. Akan tetapi, hasil belanja sangat ditentukan oleh kualitas institusi. Kelemahan dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan evaluasi dapat menyebabkan biaya proyek membengkak, keterlambatan pelaksanaan, kualitas konstruksi yang rendah, serta munculnya aset yang tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, peningkatan belanja modal perlu disertai penilaian kelayakan, prioritas proyek, evaluasi biaya dan manfaat, serta penganggaran biaya operasi dan pemeliharaan.

Bukti dari Aceh juga memperlihatkan pentingnya kualitas pengelolaan belanja daerah. Ramadana et al. (2023) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal dapat memperkuat kapasitas pelayanan dan basis ekonomi daerah apabila diarahkan pada kebutuhan yang produktif. Namun, peningkatan belanja modal yang tidak didukung perencanaan dan pengawasan dapat menciptakan beban pemeliharaan, utang kontraktual, atau aset yang tidak memberikan manfaat yang sebanding.

Liza and Mariana (2023) menunjukkan bahwa budget ratcheting dapat memoderasi hubungan antara kinerja fiskal dan alokasi investasi publik. Budget ratcheting menggambarkan kecenderungan anggaran masa kini dipengaruhi secara kuat oleh realisasi atau pencapaian masa lalu. Pola tersebut dapat membantu menjaga kesinambungan program, tetapi juga dapat menimbulkan inefisiensi apabila alokasi terus dinaikkan tanpa evaluasi kebutuhan dan hasil. Pemerintah daerah perlu menghindari penganggaran yang semata-mata berorientasi pada penyerapan dan mulai mengaitkan tambahan anggaran dengan capaian yang terukur.

Belanja pendidikan meningkatkan pertumbuhan melalui peningkatan keterampilan, kapasitas belajar, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Akan tetapi, peningkatan anggaran pendidikan tidak otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasilnya bergantung pada kompetensi guru, kehadiran siswa, kualitas kurikulum, ketersediaan sarana, tata kelola sekolah, dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Belanja pendidikan yang besar tetapi terkonsentrasi pada administrasi atau infrastruktur yang tidak digunakan dapat menghasilkan dampak yang terbatas.

Belanja kesehatan meningkatkan produktivitas melalui penurunan angka kesakitan, peningkatan harapan hidup, pengurangan beban biaya pengobatan, dan peningkatan partisipasi kerja. Perlindungan kesehatan juga mencegah rumah tangga jatuh miskin akibat pengeluaran medis yang besar. Namun, efektivitasnya membutuhkan pemerataan fasilitas, ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan,

sistem rujukan, layanan pencegahan, dan perlindungan pembiayaan. Belanja yang hanya berfokus pada pembangunan fasilitas tanpa memastikan tenaga dan operasional dapat menghasilkan sarana yang tidak berfungsi secara optimal.

Masduki, Rindayati, and Mulatsih (2022) menunjukkan bahwa kualitas belanja daerah berkaitan dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia. Temuan ini menegaskan bahwa evaluasi belanja tidak cukup hanya didasarkan pada persentase penyerapan anggaran. Pemerintah perlu menilai apakah pengeluaran benar-benar meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan pelayanan dasar. Indikator keluaran, hasil, dan dampak harus digunakan secara bersama-sama untuk menilai efektivitas program.

Masalah pemeliharaan juga sering mengurangi manfaat investasi publik. Pemerintah cenderung lebih tertarik membangun proyek baru dibandingkan memelihara aset yang sudah ada karena pembangunan baru lebih mudah terlihat secara politik. Padahal, jalan, sekolah, rumah sakit, saluran irigasi, dan jaringan air yang tidak dipelihara akan mengalami penurunan kualitas dan memerlukan biaya rehabilitasi yang lebih besar. Penganggaran berbasis siklus hidup aset diperlukan agar biaya operasi dan pemeliharaan dipertimbangkan sejak tahap perencanaan proyek.

Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari kualitas belanja. Persaingan yang terbatas, spesifikasi yang diarahkan, perubahan kontrak, dan lemahnya pengawasan dapat menurunkan nilai manfaat yang diperoleh dari setiap satuan anggaran. Pengadaan elektronik dapat meningkatkan transparansi, tetapi efektivitasnya tetap membutuhkan data harga, pengawasan independen, keterbukaan kepemilikan perusahaan, dan sanksi yang konsisten. Transparansi kontrak juga memungkinkan masyarakat memantau pelaksanaan proyek dan membandingkan hasil dengan biaya yang dikeluarkan.

Kebijakan fiskal juga berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi. Ketika permintaan swasta melemah, pemerintah dapat meningkatkan belanja atau mengurangi beban pajak untuk mencegah penurunan aktivitas yang lebih dalam. Akan tetapi, kemampuan menjalankan kebijakan kontra-siklus bergantung pada ruang fiskal, akses pembiayaan, tingkat utang, dan kredibilitas anggaran. Pemerintah yang memiliki defisit tinggi pada masa normal akan memiliki ruang yang lebih terbatas ketika terjadi krisis.

Jha et al. (2014) menemukan bahwa efektivitas kebijakan kontra-siklus di negara berkembang Asia dipengaruhi oleh kondisi awal dan kualitas institusi. Stimulus akan lebih efektif apabila dilaksanakan secara cepat, diarahkan pada sektor dengan kecenderungan belanja tinggi, dan didukung sistem administrasi yang mampu menyalurkan anggaran. Program yang memerlukan persiapan panjang mungkin terlambat memberikan dampak ketika perekonomian telah

pulih. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memiliki daftar proyek siap dilaksanakan dan sistem perlindungan sosial yang dapat diperluas secara otomatis ketika terjadi guncangan.

Ilzetzki, Mendoza, and Végh (2013) menunjukkan bahwa besarnya pengganda fiskal berbeda menurut rezim nilai tukar, keterbukaan ekonomi, dan tingkat utang. Di negara yang sangat terbuka, sebagian stimulus dapat mengalir ke impor sehingga dampaknya terhadap produksi domestik lebih kecil. Pada negara dengan utang tinggi, tambahan belanja dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal dan biaya pembiayaan. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa desain stimulus tidak dapat diseragamkan untuk seluruh negara dan periode.

Paket stimulus sebaiknya bersifat sementara, terarah, dan dapat dihentikan setelah kondisi membaik. Bantuan tunai sementara, percepatan pemeliharaan infrastruktur, dukungan bagi pekerja terdampak, dan penjaminan kredit dapat lebih mudah disesuaikan dibandingkan penciptaan program permanen. Pemerintah juga perlu membedakan antara langkah penanganan siklus ekonomi dan komitmen struktural yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Kegagalan melakukan pembedaan dapat menyebabkan defisit sementara berubah menjadi tekanan fiskal permanen.

Subsidi, Penargetan, dan Ruang Fiskal

Subsidi merupakan instrumen yang sering digunakan untuk menjaga keterjangkauan harga, melindungi daya beli, mendukung sektor tertentu, dan mengurangi dampak guncangan. Namun, subsidi harga yang diberikan secara umum sering tidak tepat sasaran karena manfaatnya meningkat seiring jumlah barang yang dikonsumsi. Rumah tangga berpendapatan tinggi biasanya menggunakan lebih banyak bahan bakar, listrik, kendaraan, dan peralatan energi sehingga memperoleh manfaat subsidi yang lebih besar secara nominal.

Subsidi energi yang luas juga menimbulkan biaya kesempatan. Anggaran yang digunakan untuk menjaga harga energi dapat mengurangi ruang fiskal bagi pendidikan, kesehatan, transportasi umum, air bersih, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Selain itu, harga yang terlalu rendah dapat mendorong konsumsi berlebihan, penyelundupan, kelangkaan, dan investasi yang kurang efisien. Dalam jangka panjang, subsidi energi juga dapat memperlambat peralihan menuju sumber energi yang lebih bersih dan memperbesar biaya lingkungan.

Coxhead and Grainger (2018) menunjukkan bahwa pihak yang memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian dari reformasi subsidi berbeda menurut pola konsumsi, struktur produksi, lokasi, dan kemampuan pemerintah memberikan kompensasi. Rumah tangga perkotaan dan pedesaan dapat menghadapi dampak yang berbeda karena penggunaan energi dan akses

transportasi tidak sama. Produsen juga dapat mengalami kenaikan biaya input yang diteruskan ke harga barang. Oleh karena itu, penilaian reformasi tidak cukup hanya menghitung penghematan anggaran, tetapi harus mencakup dampak langsung dan tidak langsung terhadap pendapatan, harga, pekerjaan, dan kemiskinan.

Penghapusan subsidi secara mendadak dapat meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli dalam jangka pendek. Kenaikan harga energi dapat memengaruhi biaya transportasi, produksi pangan, distribusi barang, dan layanan dasar. Dampaknya cenderung lebih berat bagi rumah tangga miskin karena mereka memiliki ruang penyesuaian yang terbatas. Meskipun reformasi dapat memperbaiki ruang fiskal dalam jangka menengah, proses transisi harus dikelola agar manfaat jangka panjang tidak dibatalkan oleh penurunan kesejahteraan dalam jangka pendek.

Kasus LPG bersubsidi yang dibahas Mariana (2019b) menunjukkan bahwa harga resmi dapat berbeda dari harga yang diterima konsumen dalam praktik. Perbedaan tersebut dapat muncul akibat biaya distribusi, keterbatasan pasokan, penyimpangan penyaluran, penjualan di luar sasaran, atau lemahnya pengawasan. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah subsidi tidak hanya terletak pada besarnya, tetapi juga pada tata kelola rantai distribusi. Subsidi yang secara formal ditujukan kepada kelompok tertentu dapat dinikmati oleh pihak lain apabila sistem identifikasi dan pengawasan lemah.

Reformasi subsidi perlu mencakup pemutakhiran data penerima, pengendalian distribusi, mekanisme keluhan, pemeriksaan transaksi, dan penerapan sanksi. Basis data penerima harus mampu menangkap perubahan kondisi ekonomi rumah tangga, migrasi, kelahiran, kematian, dan perubahan pekerjaan. Data yang tidak diperbarui dapat menimbulkan inclusion error, yaitu masuknya kelompok yang tidak berhak, serta exclusion error, yaitu tidak tercakupnya kelompok yang sebenarnya membutuhkan bantuan.

Digitalisasi identitas dan transaksi dapat meningkatkan akurasi serta mengurangi kebocoran. Pembelian barang bersubsidi dapat dikaitkan dengan identitas penerima, batas kuota, atau rekening tertentu. Namun, sistem digital bukan solusi tunggal. Keterbatasan jaringan, kepemilikan perangkat, literasi digital, kesalahan biometrik, dan ketidaksesuaian data dapat menghambat akses masyarakat. Oleh sebab itu, kanal layanan luring, proses koreksi data, pendampingan, dan mekanisme pengaduan tetap diperlukan.

Urutan reformasi sangat memengaruhi penerimaan masyarakat. Reformasi yang kredibel sebaiknya dimulai dengan pengumuman tujuan, jadwal, dan penggunaan penghematan secara terbuka. Pemerintah kemudian perlu memperbaiki data penerima serta memastikan sistem kompensasi siap sebelum harga disesuaikan. Bantuan dapat disalurkan sebelum atau bersamaan dengan

kenaikan harga agar rumah tangga tidak mengalami kesenjangan pendapatan. Setelah itu, dampak terhadap inflasi, konsumsi, kemiskinan, dan aktivitas usaha harus dievaluasi secara berkala.

Sebagian penghematan subsidi sebaiknya dialihkan kepada program yang manfaatnya dapat diamati secara langsung oleh masyarakat, seperti bantuan tunai, transportasi publik, layanan kesehatan, pendidikan, irigasi, energi terbarukan, dan infrastruktur desa. Transparansi penggunaan penghematan dapat memperkuat kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa reformasi bukan sekadar pengurangan dukungan pemerintah, melainkan perubahan dari subsidi harga yang kurang tepat sasaran menuju layanan yang lebih adil dan produktif.

Kompensasi perlu dirancang berdasarkan sumber dampak. Bantuan tunai cocok untuk melindungi daya beli rumah tangga dalam jangka pendek, tetapi mungkin belum cukup bagi kelompok yang bergantung pada energi sebagai input produksi. Usaha kecil, nelayan, petani, dan penyedia transportasi dapat membutuhkan dukungan tambahan berupa kredit, bantuan teknologi, perbaikan efisiensi energi, atau penyesuaian tarif yang terukur. Dengan demikian, paket kompensasi tidak selalu harus seragam bagi seluruh kelompok.

Reformasi subsidi juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi politik. Kelompok yang menikmati manfaat dari sistem lama dapat menolak perubahan, terutama ketika manfaat subsidi terlihat langsung sedangkan manfaat pengalihan anggaran baru dirasakan kemudian. Pemerintah perlu menyediakan informasi yang konsisten, menghindari perubahan kebijakan yang mendadak, dan menunjukkan capaian penggunaan dana secara berkala. Kredibilitas akan melemah apabila penghematan tidak benar-benar dialihkan pada program yang telah dijanjikan.

Integrasi Kebijakan Pajak, Belanja, dan Subsidi

Kebijakan pajak, belanja publik, dan subsidi tidak seharusnya dianalisis secara terpisah. Dampak distribusi dan pertumbuhan ditentukan oleh keseluruhan paket fiskal. Pajak konsumsi dapat terlihat regresif ketika dinilai sendiri, tetapi dampak akhirnya dapat menjadi lebih progresif apabila penerimaannya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan rendah. Sebaliknya, sistem pajak yang progresif belum tentu menghasilkan pemerataan apabila pengeluarannya lebih banyak menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi.

Pendekatan fiskal terpadu perlu menilai siapa yang membayar pajak, siapa yang menerima manfaat belanja, serta siapa yang menanggung dampak perubahan harga. Analisis insidensi fiskal dapat digunakan untuk membandingkan pendapatan rumah tangga sebelum dan sesudah pajak, subsidi, bantuan tunai, serta layanan publik. Analisis tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi apakah

kebijakan menurunkan kemiskinan dan ketimpangan atau justru memperburuknya.

Pada tingkat daerah, integrasi kebijakan menjadi semakin penting karena pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dan tanggung jawab pelayanan yang berbeda. Daerah dengan basis pajak yang kuat memiliki ruang lebih besar untuk membiayai layanan, sedangkan daerah yang bergantung pada transfer menghadapi keterbatasan otonomi fiskal. Sistem transfer antarpemerintah perlu memperhatikan kebutuhan belanja, kapasitas penerimaan, kondisi geografis, tingkat kemiskinan, dan kualitas layanan agar kesenjangan antarwilayah tidak semakin lebar.

Kualitas institusi merupakan faktor yang menghubungkan seluruh instrumen fiskal. Struktur pajak yang baik tidak akan menghasilkan penerimaan optimal tanpa administrasi yang kuat. Belanja produktif tidak akan memberi hasil tinggi tanpa perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan. Subsidi yang terarah juga tidak akan efektif tanpa data penerima dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, reformasi fiskal perlu disertai peningkatan kapasitas aparatur, integrasi data, transparansi anggaran, audit, partisipasi publik, dan evaluasi berbasis hasil.

Pada akhirnya, kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan inklusif tidak hanya mengejar peningkatan penerimaan atau pengurangan defisit. Kebijakan tersebut harus menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan distribusi, stabilitas makroekonomi, dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah perlu memilih basis pajak yang relatif efisien, mengalokasikan belanja pada program dengan manfaat sosial tinggi, mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Keberhasilan paket tersebut bergantung pada urutan pelaksanaan, kapasitas administrasi, kredibilitas kebijakan, dan kemampuan pemerintah menunjukkan hasil yang nyata kepada masyarakat.

Belanja Sosial, Ketimpangan, dan Kemiskinan

Redistribusi fiskal terjadi melalui pajak langsung, pajak tidak langsung, transfer tunai, dan layanan publik. Goñi, López, and Servén (2011) menunjukkan bahwa kapasitas redistribusi di Amerika Latin lebih lemah daripada negara maju, sedangkan Lustig, Pessino, and Scott (2014) memperlihatkan bahwa hasil bersih berbeda ketika seluruh pajak dan manfaat dihitung. Program dapat menurunkan ketimpangan pendapatan akhir tetapi tetap meningkatkan kemiskinan konsumsi apabila pajak tidak langsung dibayar oleh rumah tangga miskin melebihi transfer yang diterima.

Anderson et al. (2018) melalui meta-regresi menemukan bahwa belanja pemerintah dapat memengaruhi kemiskinan, tetapi besarnya efek bergantung pada jenis belanja dan institusi. Transfer tunai efektif untuk konsumsi segera dan

ketahanan guncangan, sedangkan pendidikan, kesehatan, dan perumahan membentuk aset jangka panjang. Mariana (2019a) menunjukkan bahwa bantuan rumah membutuhkan kriteria, verifikasi lapangan, dan prioritas yang jelas agar legitimasi dan ketepatan sasaran terjaga.

Pertumbuhan inklusif memerlukan kombinasi instrumen. Transfer tidak menggantikan layanan publik; layanan publik tidak menghapus kebutuhan pendapatan minimum; dan pajak progresif tidak efektif jika basis sempit serta kepatuhan rendah. Muinelo-Gallo and Roca-Sagalés (2013) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, ketimpangan, dan pertumbuhan ditentukan bersama. Karena itu, evaluasi harus mengukur perubahan pendapatan disposabel, akses layanan, kesempatan kerja, dan keberlanjutan pembiayaan. Tata kelola dana bergulir dan penyelesaian kredit bermasalah pada UPK Pidie juga menunjukkan bahwa inklusi ekonomi memerlukan pengendalian risiko dan akuntabilitas pembiayaan lokal (Nufiar, Mariana, and Ali 2020).

Kerangka Paket Fiskal Inklusif

Sintesis menghasilkan empat prinsip. Pertama, mobilisasi pendapatan harus memperluas basis, mengurangi pengecualian, dan memperbaiki kepatuhan sebelum menaikkan tarif secara umum. Kedua, belanja harus dinilai berdasarkan hasil, biaya siklus hidup, dan distribusi manfaat. Ketiga, subsidi perlu diubah dari subsidi komoditas yang luas menjadi dukungan rumah tangga atau layanan yang terarah. Keempat, transparansi anggaran dan evaluasi distribusi perlu dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan. Kualitas informasi akuntansi dan non-akuntansi mendukung keputusan pembiayaan yang lebih baik (Mariana, Abdullah, and Nadirsyah 2018), sementara temuan tata kelola dan likuiditas memberi dasar tambahan bagi transparansi, kehati-hatian kas, dan kesinambungan belanja (Mariana, Abdullah, and Mahmud 2020; Mariana and Ibrahim 2022).

Bagi pemerintah daerah, PBB dan pendapatan layanan dapat memperkuat akuntabilitas, sedangkan transfer pusat tetap dibutuhkan untuk standar minimum. Bagi pemerintah pusat, reformasi pajak dan subsidi harus disinkronkan dengan perlindungan sosial dan dukungan kepada daerah. Koordinasi ini mencegah satu tingkat pemerintahan memperoleh penghematan sementara tingkat lain menanggung biaya sosial tanpa sumber pembiayaan.

KESIMPULAN

Kajian sistematis menunjukkan bahwa komposisi kebijakan fiskal lebih penting daripada ukuran pemerintah secara agregat. Pajak yang sangat mengganggu investasi dapat menekan pertumbuhan, sedangkan pajak properti berulang dan basis konsumsi yang luas relatif lebih efisien apabila perlindungan distribusi dan administrasi memadai. Belanja infrastruktur, pendidikan, dan

kesehatan dapat meningkatkan pertumbuhan, tetapi dampaknya bergantung pada seleksi proyek, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Subsidi energi yang luas cenderung mahal dan kurang tepat sasaran; reformasi perlu bertahap, transparan, dan disertai kompensasi terarah. Belanja sosial menurunkan kemiskinan apabila cakupan dan manfaat memadai, tetapi pajak tidak langsung dan exclusion error dapat mengurangi hasil. Paket fiskal inklusif harus menyatukan mobilisasi penerimaan yang adil, belanja produktif, perlindungan sosial, dan evaluasi distribusi. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan data mikro pajak-belanja, desain kausal, dan analisis insidensi pada tingkat nasional maupun daerah.

SARAN

Pemerintah perlu memprioritaskan kualitas dan komposisi kebijakan fiskal melalui reformasi perpajakan yang adil, perluasan basis pajak, penguatan pajak properti, serta pengurangan pajak yang dapat menghambat investasi produktif. Pada sisi pengeluaran, anggaran perlu difokuskan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dengan didukung seleksi program yang tepat, pelaksanaan yang transparan, serta pemeliharaan yang berkelanjutan. Reformasi subsidi energi juga perlu dilakukan secara bertahap dan disertai kompensasi yang terarah bagi kelompok rentan.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data mikro yang mengintegrasikan informasi pajak, belanja rumah tangga, dan manfaat program pemerintah. Selain itu, penggunaan desain penelitian kausal dan analisis insidensi fiskal perlu diperluas untuk mengukur dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan secara lebih akurat, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A., and D. Furceri. 2010. "Government Size, Composition, Volatility and Economic Growth." *European Journal of Political Economy* 26(4): 517-532.
- Anderson, E., M. A. Jalles d'Orey, M. Duvendack, and L. Esposito. 2018. "Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-Regression Analysis." *World Development* 103: 60-71.
- Arnold, J. M., B. Brys, C. Heady, Å. Johansson, C. Schwellnus, and L. Vartia. 2011. "Tax Policy for Economic Recovery and Growth." *Economic Journal* 121(550): F59-F80.
- Barro, R. J. 1990. "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth." *Journal of Political Economy* 98(5, Part 2): S103-S125.
- Bleaney, M., N. Gemmell, and R. Kneller. 2001. "Testing the Endogenous Growth Model: Public Expenditure, Taxation, and Growth over the Long Run." *Canadian Journal of Economics* 34(1): 36-57.

- Bose, N., M. E. Haque, and D. R. Osborn. 2007. "Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries." *The Manchester School* 75(5): 533-556.
- Coxhead, I., and C. Grainger. 2018. "Fossil Fuel Subsidy Reform in the Developing World: Who Wins, Who Loses, and Why?" *Asian Development Review* 35(2): 180-203.
- Devarajan, S., V. Swaroop, and H.-F. Zou. 1996. "The Composition of Public Expenditure and Economic Growth." *Journal of Monetary Economics* 37(2): 313-344.
- Easterly, W., and S. Rebelo. 1993. "Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation." *Journal of Monetary Economics* 32(3): 417-458.
- Gemmell, N., R. Kneller, and I. Sanz. 2011. "The Timing and Persistence of Fiscal Policy Impacts on Growth: Evidence from OECD Countries." *Economic Journal* 121(550): F33-F58.
- Goñi, E., J. H. López, and L. Servén. 2011. "Fiscal Redistribution and Income Inequality in Latin America." *World Development* 39(9): 1558-1569.
- Gupta, S., B. Clements, E. Baldacci, and C. Mulas-Granados. 2005. "Fiscal Policy, Expenditure Composition, and Growth in Low-Income Countries." *Journal of International Money and Finance* 24(3): 441-463.
- Ilzetzki, E., E. G. Mendoza, and C. A. Végh. 2013. "How Big (Small?) Are Fiscal Multipliers?" *Journal of Monetary Economics* 60(2): 239-254.
- Jha, S., S. K. Mallick, D. Park, and P. F. Quising. 2014. "Effectiveness of Countercyclical Fiscal Policy: Evidence from Developing Asia." *Journal of Macroeconomics* 40: 82-98.
- Kneller, R., M. F. Bleaney, and N. Gemmell. 1999. "Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries." *Journal of Public Economics* 74(2): 171-190.
- Lee, Y., and R. H. Gordon. 2005. "Tax Structure and Economic Growth." *Journal of Public Economics* 89(5-6): 1027-1043.
- Lustig, N., C. Pessino, and J. Scott. 2014. "The Impact of Taxes and Social Spending on Inequality and Poverty in Argentina, Bolivia, Brazil, Mexico, Peru, and Uruguay." *Public Finance Review* 42(3): 287-303.
- Liza, L., and M. Mariana. 2023. "Can Budget Ratcheting Moderate the Relationship Between Financial Performance and Capital Expenditures?" *Journal of Data Acquisition and Processing* 38(3): 5472-5485. <https://doi.org/10.5281/zenodo.777718>.
- Mariana, M., S. Abdullah, and M. Mahmud. 2020. "Corporate Governance Perception Index, Profitability and Firm Value in Indonesia." *Technology and Investment* 11(2): 13-21. <https://doi.org/10.4236/ti.2020.112002>.

- Mariana, M., S. Abdullah, and N. Nadirsyah. 2018. "Informasi Akuntansi, Informasi Non-Akuntansi, dan Keputusan Pemberian Kredit." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 8(2): 177-186. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.37>.
- Mariana, M., and A. Ibrahim. 2022. "Determinan Cash Holding pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 1(1): 1-13.
- Nufiar, N., M. Mariana, and M. Ali. 2020. "Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District Did Sharia." *Journal of Social Science* 1(4): 147-151.
- Ramadana, S. W., M. Mariana, R. Rahmانيar, and S. Bahgia. 2023. "Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7(2): 1831-1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>.
- Mariana. 2019a. "Bantuan Rumah kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara)." *Jurnal Tahqiq* 14(1): 108-118.
- Mariana. 2019b. "Penetapan Harga Penjualan Gas LPG Bersubsidi di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Jurnal Tahqiq* 13(2): 190-203.
- Mariana. 2023. "Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2(2): 108-115.
- Masduki, U., W. Rindayati, and S. Mulatsih. 2022. "How Can Quality Regional Spending Reduce Poverty and Improve Human Development Index?" *Journal of Asian Economics* 82: 101515.
- Muinelo-Gallo, L., and O. Roca-Sagalés. 2013. "Joint Determinants of Fiscal Policy, Income Inequality and Economic Growth." *Economic Modelling* 30: 814-824.
- Page, M. J., et al. 2021. "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews." *BMJ* 372: n71.
- Romer, C. D., and D. H. Romer. 2010. "The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks." *American Economic Review* 100(3): 763-801.